



Kerja Sama Multistakeholder *National Plastic Action Partnership* (NPAP) sebagai Upaya Penanganan Sampah Plastik di Perairan Bali Melalui Edukasi Pada Pelajar

Zenith Irba Setya Pratama

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; zenithirbaa@gmail.com

Wiwiek Rukmi Dwi Astuti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

| Dikirim: 08-08-2024 | Diterima: 22-01-2025 | Dipublikasikan: 31-01-2025 |

Keywords

NPAP, multi-stakeholder, education, plastic waste, Bali

ABSTRACT

Indonesia is the fifth country in Asia that contributes the most plastic waste to waterways and one of the provinces with the most pollutants is Bali. This research aims to find out the National Plastic Action Partnership's (NPAP) multistakeholder collaboration in handling marine plastic waste in Bali Province through student education (2020–2023). This research uses the multistakeholder partnership theory by analyzing the multistakeholder cooperation process through three stages, namely scoping and building, managing and maintaining, and reviewing and revising. The research method used is descriptive-qualitative, which involves collecting data through interviews and literature studies. The results of this study show that there are three stages of the collaboration process: first, the results of stakeholder mapping by NPAP to reduce plastic waste in waters by 70% through education for students in Bali, namely PPLH Bali through the ecological school program and Bye Bye Plastic Bags through the Youthtopia program. The second stage is the management of educational programs that are managed together with other NPAP members, which are also supported by funding either through incentives or sponsorship. Finally, the review stage is held by NPAP and carried out in the ecological school program. Transparency and coordination are this multi-stakeholder cooperation's weaknesses, which still require improvement.

Kata Kunci

NPAP, multistakeholder, edukasi, sampah plastik, Bali

ABSTRAK

Indonesia berada dalam posisi kelima sebagai negara di kawasan Asia yang menyumbang sampah plastik terbanyak ke perairan dan salah satu provinsi yang menjadi polutan terbanyak adalah Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama multi stakeholder *National Plastic Action Partnership* (NPAP) dalam menangani sampah plastik di perairan Provinsi Bali melalui edukasi pada pelajar (2020-2023). Penelitian ini menggunakan teori Multistakeholder Partnership dengan menganalisis proses kerja sama multistakeholder melalui tiga tahap yaitu pemetaan dan pembangunan, mengelola dan memelihara, serta meninjau dan merevisi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga tahap proses kerja sama, pertama, hasil pemetaan stakeholder oleh NPAP untuk mengurangi sampah plastik di perairan sebanyak 70% melalui edukasi kepada pelajar di Bali, yaitu PPLH Bali melalui program sekolah ekologis dan Bye Bye Plastic Bags melalui program youthtopia. Tahapan kedua yaitu pengelolaan program edukasi yang dikelola bersama dengan anggota NPAP lainnya, yang sekaligus didukung pendanaannya baik melalui pemberian insentif ataupun sponsor. Terakhir, tahap peninjauan diadakan oleh NPAP dan dilakukan pada program sekolah ekologis. Adapun kekurangan dalam kerja sama multistakeholder ini yaitu transparansi dan koordinasi yang masih perlu ditingkatkan.

PENDAHULUAN

Berkembangnya inovasi yang diciptakan manusia, telah memberikan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Manusia ingin dipermudah dalam mobilisasi, mengakses informasi, sampai dengan mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini mengakibatkan terciptanya berbagai produk-produk yang praktis sehingga dapat memudahkan aktivitas manusia. Plastik adalah salah satu bahan material yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sifatnya yang ringan, kokoh, dan tidak mudah berkarat telah membuat banyak sekali pihak produsen yang menggunakannya. Selain sisi positif dari penggunaan plastik, terdapat sisi negatif dari penggunaannya. Sebagian besar plastik tersebut dipergunakan secara sekali pakai dan terbuat dari senyawa *xenobiotik*, yaitu senyawa yang secara alami tidak diproduksi oleh spesies biologis. Plastik tidak dapat diproduksi secara alami sehingga organisme yang ada di alam tidak akan mengenal senyawa yang ada di dalam plastik (Utami, 2022). Oleh karena itu, sampah plastik menjadi menumpuk dan membawa dampak negatif pada lingkungan.

Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN di tahun 2018, terdapat kurang lebih 300 juta ton plastik telah dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian, data dari World Population Review tahun 2021 menunjukkan 4,8 sampai 12,7 juta metrik ton plastik bermuara ke laut setiap tahunnya. Laporan tersebut menghasilkan urutan negara di Asia berdasarkan jumlah sampah plastik ke laut di dunia. Dalam laporan ini, Indonesia berada dalam posisi ke lima dengan 56.333 ton plastik di tahun 2021. Permasalahan tersebut akan berdampak pada biota laut dan dapat menimbulkan efek domino bagi kesehatan manusia, kesejahteraan individu, kesetaraan gender, dan lainnya. Oleh karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh untuk melawan permasalahan plastik dan berharap dapat menarik kolaborasi dalam skala global. Akhirnya, Indonesia bekerja sama dengan Global Plastic Action Partnership untuk berupaya dalam menangani isu ini.

Global Plastic Action Partnership atau GPAP adalah platform *multi-stakeholder* yang berdedikasi untuk mengurangi polusi sampah plastik dengan aksi nyata. GPAP dinaungi oleh World Economic Forum, sebuah organisasi internasional untuk memediasi kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta. GPAP bekerja sama dengan negara-negara untuk mengatasi sampah plastik secara nasional. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara pertama yang bekerja sama dengan GPAP. Di bulan April tahun 2020, diluncurkan National Plastic Action Partnership atau NPAP yang melibatkan *multi-stakeholder*. NPAP memiliki lima area utama dan satgas di masing-masing area yaitu *financing, policy, innovation, metrix, dan behavior change*. Satgas ini perubahan perilaku bertugas untuk membuat masyarakat memilih pilihan yang positif terhadap keputusan pengolahan sampah. Mereka mendorong masyarakat untuk mengikuti program pengurangan plastik, mengajarkan cara berperilaku dalam membuang sampah, menggunakan kembali, serta daur ulang.

Upaya mengedukasi masyarakat mengenai konsumsi dan pembuangan yang berkelanjutan terbagi menjadi 3 area yaitu para pebisnis masyarakat diluar kota-kota besar, serta pelajar (Indonesia National Plastic Action Partnership, 2021). Edukasi mengenai permasalahan sampah baik dilakukan pada usia belajar. Seseorang yang dapat dikatakan pelajar adalah individu yang sedang dalam proses belajar (Rini, 2008). Usia belajar merupakan usia dimana terjadi proses perubahan perilaku individu yang diperoleh dari hasil interaksi individu dengan lingkungannya (Arifin H. Z., 2017). Berdasarkan data MAPID (2020) mengenai kepedulian masyarakat terhadap sampah plastik, menunjukkan bahwa kelompok usia yang paling banyak menggunakan plastik adalah responden dengan usia diantara 13-25 tahun sebanyak 90%. Penggunaan plastik yang paling sering adalah kantong plastik, sedotan dan *styrofoam*. Fenomena ini menjadi perhatian bahwa pelajar memiliki peran penting dalam upaya menangani sampah plastik.

Satgas di setiap area menyebar ke seluruh penjuru provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bali. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi di Indonesia yang menjadi tempat

favorit untuk wisatawan asing di tahun 2022 adalah Bali. Selain itu, Bali menduduki posisi ke sembilan sebagai tempat destinasi favorit wisatawan domestik di tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, banyaknya wisatawan asing dan domestik juga sejalan dengan banyaknya usaha yang berkembang dan meningkatnya jumlah penduduk. Menurut data *Bali Partnership* di tahun 2019, menyatakan bahwa terdapat 52% sampah tidak dikelola dengan baik di Bali. Setiap harinya, Bali telah memproduksi sampah sebanyak 4.281 ton, dan 11% diantaranya mengalir ke lautan. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Sungai Watch yang berjudul *Sungai Watch Impact Report 2021*, Bali memiliki 372 sungai dan lebih dari 90% penduduk Bali tinggal di dekat sungai yang jaraknya hanya 1 kilometer dari rumahnya. Namun, menurut data dari *Bali Partnership* dan pemerintahan Bali ditemukan bahwa terdapat 33.000 ton plastik yang masuk ke sungai-sungai di Bali setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 90 ton plastik memasuki sungai di Bali setiap harinya. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisis bagaimana kerja sama *Multi-stakeholder* National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam Menangani Sampah Plastik Di Perairan Provinsi Bali Melalui Edukasi Pada Pelajar (2020-2023).

Dalam upaya untuk menjamin relevansi penelitian ini serta sebagai penunjang penelitian maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu berupa artikel jurnal dan skripsi. Pertama, literatur mengenai kerja sama *multi-stakeholder*, dapat ditemukan pada tulisan Maisarah, Harlyandra dan Kafa, Himalia, serta Olvy Zuhriana. Maisarah (2021) menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam kolaborasi antara NPAP dan GPAP. NPAP merupakan sebuah platform yang dapat mengumpulkan berbagai *stakeholder* untuk mengurangi sampah plastik di perairan pada 2025 di Indonesia. Menurutnya, tujuan serta ambisi yang dimiliki Indonesia patut diapresiasi, tetapi terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder, ditemukan tantangan yang ada dalam *good governance*, kebijakan serta program dari NPAP, dukungan publik, dan *financing*. Ditemukan bahwa kebijakan dan program yang telah dibentuk sudah cukup baik. Namun, hal tersebut tidak didukung dengan dukungan publik, tata kelola yang buruk, serta partisipasi masyarakat yang sangat rendah.

Harlyandra dan Kafa (2021) menjelaskan kerja sama *multi-stakeholder* untuk mewujudkan program *corporate social responsibility* atau CSR. Penelitian ini membahas mengenai PT. Cirebon Electric Power yang menjalankan CSR. Program CSR tersebut melibatkan banyak pihak dalam kerja sama atau yang disebut juga dengan *multi-stakeholder*. Hal ini disebabkan perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain yang mendapatkan dampak atau terikat pada perusahaan. Pada program ini, kerja sama *multi-stakeholder* melibatkan PT. CEP (sebagai *inisiator, enabler, mentor, dan controller*) kelompok formasi PL (sebagai *implementer dan controller*), Pemerintah Desa Pangarengan (sebagai *regulator dan controller*), Kelompok PESPA (*implementer*), Tokoh Masyarakat (*enabler dan controller*), serta DLH Kabupaten Cirebon (*regulator dan implementer*) (Harlyandra & Kafa, 2021). Penulis menyatakan bahwa program ini menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Beberapa diantaranya adalah Pemerintah Desa yang masyarakatnya dibuat menjadi lebih produktif dan lingkungannya bisa terbebas dari polusi sampah; lingkungan di sekitar PT. CEP yang terberdayakan; serta Kelompok masyarakat yang merasa lingkungannya menjadi lebih bersih dan sehat. Kerja sama *multistakeholder* ini dianggap berhasil karena pihak-pihak tersebut sudah merasakan adanya perubahan ke tingkat yang lebih baik.

Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kerja sama *multistakeholder* memiliki peran penting dalam menangani isu lingkungan dan sosial. Maisarah (2021) menunjukkan bahwa meskipun NPAP memiliki tujuan yang baik dalam mengurangi sampah plastik, tantangan terkait *governance*, kebijakan, dan dukungan publik perlu diatasi untuk mencapai hasil yang efektif. Sementara itu, Harlyandra dan Kafa (2021) menyoroti keberhasilan kerja sama *multi-stakeholder* dalam program CSR PT. Cirebon Electric Power, yang menguntungkan berbagai pihak dan meningkatkan kualitas lingkungan serta produktivitas masyarakat. Kedua penelitian ini menunjukkan

bahwa efektivitas kerja sama antara berbagai *stakeholder* sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan dukungan dari semua pihak terlibat. Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini mengkaji mengenai kerja sama *multistakeholder* NPAP dalam menangani sampah plastik di perairan Bali. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana kerja sama *multi-stakeholder* National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam menangani sampah plastik di perairan provinsi Bali melalui edukasi pada pelajar (2020-2023).

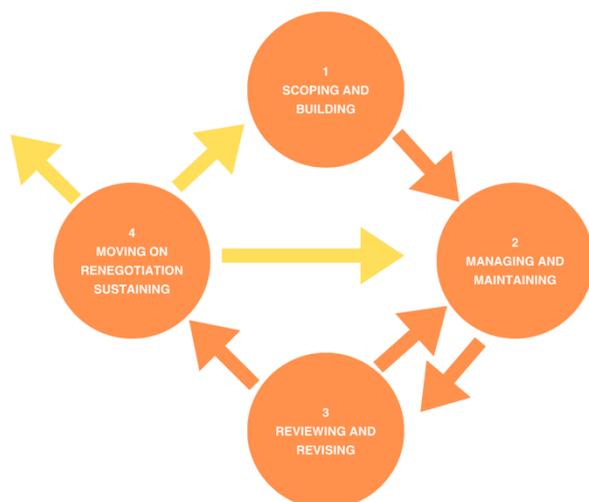
KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Kerja Sama Multistakeholder Partnership

Pada awalnya, penyebutan mengenai Multistakeholder Partnership (MSP) berada dalam tujuan *Sustainable Development Goals* ke-17 yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan MSP berkembang dan menjadi hal yang penting dalam semua tujuan SDG. MSP adalah sebuah sarana untuk pihak-pihak yang tertarik dalam mencapai suatu kepentingan dengan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan bekerja secara individual. MSP dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi-organisasi dari berbagai sektor masyarakat untuk bekerja sama menciptakan cara-cara yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Nel, 2017). Pada tingkat global, MSP bergerak untuk mencapai tujuan dengan pendekatan *top-down*. Pada tingkatan lokal, proses dalam berjalannya MSP dapat memasukkan faktor-faktor lokal atau yang lebih dekat dengan masyarakat (United Nations, 2020). Selain itu, beberapa kemitraan sudah menunjukkan adanya kolaborasi antara tingkat global dan tingkat lokal. Hal ini dimasukdikan bahwa penggabungan terjadi disaat upaya untuk mencapai tujuan secara global dilakukan dengan cara yang me-lokal agar tetap relevan dengan masyarakat setempat.

Di dalam *The SDG Partnership Guidebook*, terdapat konsep yang menjelaskan proses dari berjalannya MSP dan berbagai tahapan yang dilaluinya. Tahapan tersebut dibagi menjadi empat. Pada tahap pertama yaitu *scoping* dan *building*, dilakukan konstruksi atau pemetaan terhadap para *stakeholders* yang memiliki kepentingan yang sama, *stakeholder* yang relevan, dan melibatkan *stakeholder* kunci untuk menyatukan pemikiran bersama mengenai permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu, tahap ini akan melakukan proses identifikasi terhadap calon-calon mitra yang akan bekerja sama dan kemudian dilibatkan dalam *partnership formation journey*. Kedua, tahap *managing* dan *maintaining* merupakan fase awal dalam fase implementasi. Pada fase awal ini, akan menetapkan *governance* atau tata kelola kerja sama, susunan operasional dan manajemen, serta pendistribusian sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Pada tahap ketiga yaitu *reviewing* dan *revising* merupakan fase kedua dalam fase implementasi. Tahap ini bertujuan untuk menjaga kemitraan berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan proses monitoring dan meninjau kembali program yang dilakukan. Tahap keempat yaitu *moving on*, adalah tahap penentuan nasib dan kelanjutan dari MSP. MSP tersebut dapat berlanjut, tidak dilanjutkan, melembagakan kegiatannya kepada salah satu mitra atau pembentukan organisasi baru, meningkatkan skala, pergantian mitra, atau mengarahkan ulang upaya yang akan dilakukan.

Gambar 1. Proses MSP



Sumber: The SDG Partnership Guidebook, 2020 : 38

Berdasarkan penjelasan mengenai MSP dan diagram proses berjalannya MSP, konsep ini merupakan konsep yang relevan untuk diaplikasikan dalam menjelaskan kerja sama multistakeholder yang ada dalam NPAP penulis memfokuskan 3 dari 4 tahap yang ada dalam menganalisa kerja sama *multistakeholder* melalui NPAP untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Perairan Provinsi Bali terutama pendekatan edukasi pada pelajar. Hal tersebut dilakukan karena kerja sama ini belum mencapai tahap akhir dalam kerja sama.

Konsep Enviromentalisme dalam Hubungan Internasional

Permasalahan lingkungan telah lama menjadi fokus perhatian internasional, terutama sejak awal abad ke-21, ketika kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat. Keamanan lingkungan kini dianggap sebagai ancaman global yang memerlukan tanggung jawab dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan yang ada. Isu lingkungan, yang melibatkan keterkaitan dengan ekonomi global dan memerlukan upaya bersama dalam penanganannya, menjadi elemen penting dalam politik internasional (Bakry, 2017). Dalam konteks ini, konsep enviromentalisme muncul sebagai pendekatan yang berfokus pada perlindungan kekayaan alam dan ekosistem, serta memanfaatkan pendekatan liberal institusional yang menilai bahwa institusi internasional merupakan kunci dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan (Eckersley, 2007).

Gerakan *enviromentalist*, yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan profesional, memainkan peran krusial dalam melindungi lingkungan dengan berbagai cara, termasuk aksi publik, lobi politik, dan pendidikan. Keberhasilan gerakan ini di abad ke-20, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, disebabkan oleh dukungan masyarakat yang luas dan strategi komunikasi yang efektif, seperti pemanfaatan media dan pembentukan aliansi dengan gerakan sosial lainnya (Jofré, 2017). Konsep dan strategi yang diterapkan oleh gerakan enviromentalis menunjukkan bahwa kerja sama yang erat antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mencapai perubahan sosial dan lingkungan yang signifikan (Lestari, 2016). Oleh karena itu, konsep enviromentalisme diharapkan dapat menjadi dasar yang solid untuk menganalisis kerja sama *multi-stakeholder* seperti NPAP dalam menangani sampah plastik di perairan Bali, dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan tindakan konkret untuk mengatasi masalah lingkungan.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci. Dalam jenis penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik penggabungan dan analisis data yang kesimpulannya ditarik secara induktif (Sugiyono, 2010). Jenis penelitian kualitatif digunakan oleh penulis karena ingin mengeksplorasi fenomena yang ada dan berada dalam situasi dan kondisi yang alami. Penulis berupaya dalam mengeksplorasi kerja sama *multistakeholder* NPAP dalam menangani sampah plastik di Perairan Provinsi Bali melalui edukasi pada pelajar dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian jenis kualitatif untuk diaplikasikan ke dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Platform Multistakeholder dalam Penanganan Sampah Plastik di Perairan

1. Global Plastic Action Partnership (GPAP)

Global Plastic Action Partnership (GPAP) adalah platform yang didirikan oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2018, dengan tujuan mengubah komitmen terhadap polusi sampah plastik menjadi tindakan nyata. Pendekatan GPAP mencakup mengumpulkan komunitas dan mengurangi percakapan, menghasilkan pengetahuan baru dan membentuk *action roadmaps*, serta mempercepat investasi strategis untuk solusi berpotensi tinggi.

Struktur pemerintahan GPAP terdiri dari Governing Council, Steering Board, Advisory Committee, Affiliate Members, GPAP Secretariat, dan Plastic Action Champions. Pilar strategis GPAP meliputi *convening communities and curating conversations, generating new knowledge and action roadmaps, dan catalysing strategic investment for high potential solutions*. Sektor fokus GPAP melibatkan *informing policy, unlocking finance, transforming behaviour, boosting innovation, harmonising metrics, dan promoting inclusivity*. GPAP bertujuan untuk mengatasi tantangan sampah plastik dengan membangun platform nasional di negara-negara mitra dan menciptakan platform global yang memperkuat kolaborasi *multistakeholder*. Saat ini, GPAP bermitra dengan berbagai negara termasuk Indonesia, Vietnam, Pakistan, dan banyak lainnya, untuk menciptakan solusi yang pragmatis dan ambisius dalam mengatasi polusi plastik.

2. National Plastic Action Partnership (NPAP)

Pada bulan Maret 2019, Indonesia menjadi mitra pertama GPAP dan memiliki NPAP sebagai platform yang mempertemukan *stakeholder* untuk mengurangi sampah plastik sebanyak 70% dan mencapai *plastic pollution - free* di tahun 2040. NPAP Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dengan WRI Indonesia bertugas sebagai sekretariat. NPAP bertujuan mendukung berbagai organisasi dan *stakeholder* dalam mencapai tujuan pengurangan sampah plastik. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan kekayaan laut yang beragam, menghadapi masalah genting sampah plastik yang mengancam industri perikanan.

NPAP mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab permasalahan ini: sistem pengelolaan sampah yang belum berkembang dan kurang didanai, penggunaan plastik yang tidak tepat, serta rendahnya nilai pasca-pakai plastik. Untuk mengatasi masalah ini, NPAP mengadopsi *System Change Scenario* (SCS) dengan lima perubahan utama, termasuk mengurangi penggunaan plastik, mendesain ulang produk plastik, meningkatkan pengumpulan dan daur ulang plastik, serta memperluas fasilitas pembuangan limbah. NPAP Indonesia terdiri dari beberapa tim, termasuk SYSTEMIQ Project Team, NPAP Steering Board, dan NPAP Expert Panel, dengan sekretariat dipegang oleh WRI Indonesia. Tim-tim ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi polusi plastik di Indonesia. NPAP juga memiliki lima pilar utama: kebijakan, pembiayaan, inovasi, metrik, dan

perubahan perilaku, dengan masing-masing pilar memiliki task forces yang melibatkan berbagai *stakeholder*.

Pencapaian tujuan NPAP, yaitu untuk mengurangi sampah plastik di perairan sebanyak 70%, diperlukan aksi nyata yang dilakukan oleh semua aktor di dalam *plastic value chain*. Semua satgas di setiap area bekerja untuk mencapai tujuan tersebut terwujud. Satgas *behaviour change* atau perubahan perilaku bertugas untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendorong perilaku setiap individu yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan polusi sampah plastik. Upaya untuk mendorong perubahan perilaku diperlukan kinerja dari seluruh aktor yang ada di *plastic value chain*, yaitu individu, keluarga, komunitas, bisnis, innovator, sektor publik dan swasta, dan semuanya yang terlibat langsung dalam mencegah polusi sampah plastik dan meningkatkan cara pengelolaan dan pemulihan sampah. Semua aktor perlu bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik yang diproduksi, di beli, dikonsumsi, dan mengubah cara plastik dikelola dan dibuang. Pada tahun 2021, *roadmap* satgas perubahan perilaku yang berjudul *Behaviour Change Roadmap to Radically Reduce Plastic Pollution in Indonesia* diluncurkan berdasarkan strategi yang sudah dibangun oleh *Action Plan* NPAP. Pada *roadmap* tersebut dijelaskan bahwa upaya-upaya yang akan dilakukan menggunakan pendekatan secara *holistic* atau menyeluruh. Pendekatan secara menyeluruh diperlihatkan dengan mendukung pemerintah, para pelaku bisnis, dan masyarakat sipil dalam upayanya untuk mendorong perubahan perilaku pada tingkat individu. Tujuan akhir dari satgas perubahan perilaku yaitu agar individu dan organisasi mulai mengadopsi perilaku positif yang berkontribusi langsung terhadap pencegahan polusi sampah plastik dan meningkatkan pengelolaan sampah beserta pemulihannya.

Pada *roadmap* tersebut terdapat lima panduan yang akan digunakan setiap anggota satgas untuk menjalankan kegiatan dan program-programnya. Panduan untuk satgas perubahan perilaku akan berfokus seputar upaya pemerintah untuk mendorong pelaku bisnis agar mendesain ulang kemasan plastik, membuat akses ke tempat pengelolaan sampah menjadi lebih mudah, penggunaan bahan yang mudah di daur ulang dan digunakan kembali, kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku, serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Seluruh misi tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Namun, edukasi menjadi salah satu misi mendasar. Menurut Notoadmodjo (2014), edukasi didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha dalam memberikan pesan untuk masyarakat, individu, ataupun kelompok. Edukasi adalah proses memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada seseorang melalui pembelajaran, sehingga individu atau kelompok yang menerima edukasi dapat memenuhi harapan pendidik. Hal tersebut mencakup transformasi dari individu yang tidak mengetahui menjadi mengetahui, dan dari individu yang tidak mampu menjadi mandiri (Fitriani, 2011). Gunawan (2021), mengatakan bahwa tujuan dari edukasi ialah dapat membuat pengetahuan lebih luas, kepribadian yang membaik, menanamkan nilai positif, serta melatih diri untuk mengembangkan bakat atau talenta.

Edukasi penting diberikan kepada seluruh masyarakat. Satgas perubahan perilaku NPAP Indonesia memiliki tiga target area dalam melakukan edukasi. Area tersebut diantaranya mengedukasi pelajar, mengedukasi masyarakat diluar kota-kota besar, dan mengedukasi pelaku bisnis. Pemberian edukasi pada pelajar menjadi hal yang sangatlah perlu dilakukan. Pelajar bisa dikatakan sebagai seseorang yang sedang melakukan pengumpulan dan penambahan sejumlah ilmu dan pengetahuan (Nasution, 1995, dalam Rini, 2008). Pelajar dan pengajar berupaya melakukan kegiatan edukatif secara sengaja (Sudjana, 1990 dalam Rini, 2008). Secara umum rentang usia seorang pelajar dapat dilihat dari jejang pendidikan sekolah formal yaitu Sekolah Dasar (SD) 6-12 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12-15 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 15-18 tahun, Universitas atau Perguruan Tinggi berada di usia 18 tahun keatas. Menurut BPS, usia pelajar aktif berpartisipasi dalam sekolah yaitu pada 7-24 tahun.

Di Indonesia, komposisi penduduk Indonesia menunjukkan adanya dominasi pada usia muda, dimana usia belajar yaitu usia 7 – 24 tahun berjumlah 70,33 juta jiwa pada tahun 2022 dengan status

masih aktif sekolah (Badan Pusat Statistik, 2023). Pemberian edukasi pada anak di usia pelajar perlu untuk memberikan nilai positif pada proses pembentukan karakter sehingga individu dapat menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Menurut seorang ahli bernama Jean Piaget, tujuan daripada edukasi bukanlah untuk menambah jumlah pengetahuan, tetapi untuk menciptakan kemungkinan bagi anak untuk membuat, menemukan, serta melakukan hal-hal yang baru. Jean Piaget dengan teorinya mengenai perkembangan kognitif, menunjukkan bahwa kecerdasan akan terus mengalami perubahan. Sebelumnya, kognitif merupakan kemampuan seorang anak untuk berpikir secara lebih kompleks. Selain itu, kognitif diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan penalaran serta memecahkan masalah (Desmita, 2010 dalam Marinda, 2020).

Menurut Marinda (2020), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif tersebut terjadi. Faktor tersebut ialah faktor kematangan, hereditas, pembentukan, minat dan bakar, serta lingkungan. Pada faktor terakhir yaitu lingkungan, sangat menekankan pada pentingnya edukasi dalam perkembangan kognitif anak. Edukasi dapat membantu anak dalam mengembangkan serta memperbaharui skemata. Skemata menurut piaget adalah dasar pembangunan pemikiran dan sebagai representasi bentuk dari seperangkat ide, aksi, dan persepsi individu. Dengan memberikan edukasi dan memberikan pengalaman yang baru pada anak, dasar pembangunan pemikiran anak akan terbentuk. Edukasi juga dapat membantu anak melalui proses adaptasi. Edukasi yang baik akan membuat anak bereksplorasi dan mencoba hal-hal baru yang penting untuk membantu perkembangan kognitif.

Kemudian, tujuan utama pemberian edukasi tentunya untuk mempersiapkan individu-individu penerus bangsa yang akan memimpin di generasi berikutnya. Mempersiapkan para pelajar melalui edukasi akan membuat mereka menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Selain sebagai investasi untuk masa depan, edukasi dapat membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada individu, mengembangkan berbagai keterampilan, kesetaraan akan pemberian kesempatan yang sama, dan menciptakan perubahan untuk masa depan. Pelajar perlu tau dan diberi edukasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi secara nasional dan global. Oleh karena itu, edukasi mengenai lingkungan penting untuk dilakukan. Permasalahan polusi sampah plastik menjadi permasalahan nasional dan global yang perlu diketahui oleh generasi muda. Hal tersebut dapat dikatakan karena generasi muda memegang peran penting bagi keberlanjutan nasib dari lingkungan. Dengan memahami mengenai pelestarian lingkungan beserta permasalahannya, mereka dapat menjadi pembela lingkungan yang aktif menyuarakan untuk mengatasinya di masa depan. Edukasi akan membantu proses identifikasi masalah sehingga dapat mengambil tindakan yang proaktif. Sifat tanggung jawab untuk lingkungan dan kesadaran untuk mengatasinya akan timbul dan berpotensi untuk membuat individu tersebut menjadi pemimpin dalam upaya pelestarian lingkungan.

Analisis Kerja Sama Multistakeholder NPAP

Scoping and Building

Tahapan awal terbentuknya MSP merupakan *tahap scoping and building* atau pemetaan dan pembangunan. Pada tahapan pertama ini menjadi landasan bagi MSP agar kerja sama dapat berjalan sesuai tujuan. Selain itu, pada tahap awal ini, para pemangku kepentingan dipetakan dengan menganalisa peran dari setiap *stakeholder*. Penyatuan tujuan dalam GPAP diawali oleh WEF. WEF memutuskan untuk membentuk platform GPAP karena adanya keresahan mengenai banyaknya komitmen dalam dunia usaha dan pemerintahan yang tidak menghasilkan wujud dan aksi kemajuan yang nyata untuk lingkungan yang lebih baik. Masyarakat juga dalam hal ini semakin sadar akan krisis dan dampak dari polusi plastik yang semakin nyata sehingga menuntut agar terciptanya solusi konkret untuk mengatasinya. Keinginan yang sama untuk menyelesaikan polusi sampah plastik akhirnya mendorong WEF untuk membentuk platform bernama GPAP. Pada tingkatan secara global,

WEF dapat diidentifikasi sebagai *stakeholder* kunci yang berperan untuk menyatukan pemikiran bersama mengenai permasalahan yang akan dihadapi secara global. Anggota WEF yang mengawali penyatuan tujuan ini adalah Pemerintahan Inggris, Pemerintahan Kanada, Dow, Nestle, PepsiCo, The Coca-Cola Company, the World Bank Group dan The World Resources Institute.

GPAP tidak hanya beroperasi secara global, melainkan bekerja dalam tingkat nasional. Hal tersebut dimaksudkan bahwa GPAP bekerja sama dengan negara-negara untuk mengembangkan platform nasionalnya, menciptakan *roadmaps*, agar tujuan untuk mengatasi polusi sampah plastik secara global dapat tercapai. Pada tahun 2023, terdapat 12 negara yang sudah bekerja sama dengan GPAP. Indonesia merupakan negara pertama yang bekerja sama dengan GPAP. Indonesia bergabung di tahun 2019 dan akhirnya meluncurkan NPAP Indonesia di tahun 2020. Pada proses penyatuan tujuan, rencana untuk mengurangi sampah plastik sebanyak 70% di tahun 2025 sudah tertera dalam Rencana Aksi Sampah laut pada lampiran Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 83 tahun 2018. Kemudian pemerintah menyusun lima strategi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional atau RAN. Indonesia membawa solusi dan rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut ke dalam World Economic Forum's Annual Meeting di Davos. Lalu, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk bekerja sama dengan GPAP sebagai pelengkap dari berbagai upaya mengurangi polusi sampah plastik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pebisnis, akademisi, NGO, kelompok masyarakat dan agama (World Economic Forum, 2020). Dengan adanya NPAP, pembuat kebijakan, produsen dari sektor bisnis, pengusaha, organisasi masyarakat, dan lainnya dapat bertemu dan berkolaborasi untuk bergotong royong mendukung pencapaian target nasional. Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi *stakeholder* kunci karena pemerintah membentuk rencana untuk mengurangi sampah sebanyak 70% sehingga terjadi penyatuan tujuan dan pemikiran bersama mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.

Kemudian, NPAP Indonesia melakukan pemetaan *stakeholder* ke setiap area fokus. Berdasarkan cakupan penelitian penulis, *Bye Bye Plastic Bags* atau BBPB dan PPLH Bali merupakan NGO yang berjuang dalam area perubahan perilaku dengan melakukan edukasi di Bali. *Stakeholder* tersebut memiliki pengalaman yang berbeda dalam tahap pemetaan ini. *Bye Bye Plastic Bags* dan PPLH Bali berupaya untuk mengatasi masalah permasalahan polusi sampah plastik di perairan Bali dengan melakukan edukasi. *Stakeholder* tersebut memiliki pengalaman yang berbeda dalam tahap pemetaan ini. Di dalam NPAP, PPLH Bali berperan sebagai *knowledge/data provider* dan *amplifier*. PPLH Bali melakukan penyebaran pembelajaran melalui berbagai program pendidikan yang dimilikinya dan memberikan data serta pengalaman yang dilalui PPLH Bali kepada para *stakeholders* lainnya dalam NPAP. Menurut (Yanti, 2024) selaku Program Manager Sekolah Ekologis PPLH Bali, mereka tidak secara langsung ikut dalam NPAP. PPLH bergabung melalui aliansi yang bernama Aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI. AZWI memiliki 10 anggota berupa organisasi yang terdiri dari YPBB, GIDKP, Necus3 Foundation, ECOTON, ICEL, Zero Waste, Greenpeace Indonesia, Gita Pertiwi, WALHI, dan PPLH Bali. PPLH Bali ditawarkan untuk bergabung mencapai target yang telah ditetapkan dan setuju untuk bergabung. PPLH Bali memutuskan untuk bergabung karena mereka juga percaya bahwa pengurangan plastik sekali pakai tidak bisa diatasi oleh seorang aja. LSM, perusahaan, pemerintah, masyarakat perlu bekerja sama. PPLH bergabung dengan NPAP karena setuju dan memiliki tujuan untuk menyebarkan *awareness* mengenai permasalahan plastik ini dan ingin turut serta untuk mencapai tujuan NPAP yaitu mengurangi sampah perairan sebanyak 70% di tahun 2025.

Di sisi lain, *Bye Bye Plastic Bags* atau disebut juga dengan BBPB bergabung dengan NPAP secara langsung. BBPB dalam hal ini berperan sebagai *amplifier*, dan *influencer*. BBPB melakukan edukasi dan menyebarkan *awareness* mengenai polusi sampah plastik dan aktif berkampanye melalui media sosial. *Founder* atau penemu dari BBPB sendiri yaitu Melati Wijsen berperan sebagai *Plastic Action Champions* dari GPAP. Dengan begitu, BBPB bergabung dengan NPAP. Selain itu, menurut Wijsen

(2024) BBPB sebagai organisasi yang dipimpin oleh generasi muda percaya bahwa kerja sama *multistakeholder* adalah langkah yang tepat karena satu organisasi saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan polusi sampah plastik ini. Dalam penyelesaian masalah ini diperlukan kekuatan, jaringan dan sumber daya dari berbagai *stakeholder*. Kolaborasi antar semua level sangat penting untuk mencapai tujuan ini. BBPB bergabung dengan NPAP memiliki intensi agar suara yang dimiliki oleh generasi muda dapat direpresentasikan dan didengar, mendengar perspektif *stakeholder* lain serta memberikan ilmu dan pengalaman yang BBPB punya.

Managing and Maintaining

Managing and maintaining atau mengelola dan memelihara merupakan tahap kedua MSP dan tahap awal dari fase implementasi. Tahap awal ini akan dilakukan penetapan tata kelola kerja sama, susunan operasional dan manajemen, serta pendistribusian SDM dan sumber daya keuangan. Pengelolaan NPAP dilakukan oleh sekretariat NPAP yaitu WRI Indonesia dan dibantu oleh beberapa divisi utama yaitu *SYSTEMIQ Project Team* sebagai tim riset dan penelitian, *NPAP Steering Board* sebagai tim pengawas pengelolaan kerja sama secara operasional, dan *NPAP Expert Panel* yang bertugas sebagai pemandu analisis. Satgas NPAP menjalankan program-program dengan berlandaskan pada lima poin aksi utama. Lima poin aksi utama yaitu *reduce or substitute plastic usage, redesign 500,00 tonnes of plastic products and packaging, double plastic-waste collection, double current recycling capacity, dan build or expand controlled waste-disposal facilities* (Indonesia National Plastic Action Partnership, 2021). Pengelolaan keuangan NPAP dipegang oleh satgas keuangan yang kepalai oleh Dian Lestari dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menjabat sebagai kepala perubahan lingkungan dan kebijakan multilateral dan Winfried Wucklein sebagai Direktur *Asian Development Bank* atau ADB. Sebanyak 18,4 miliar dollar harus dikeluarkan untuk mendukung pendanaan pengelolaan sampah, daur ulang, dan sistem pembuangan di Indonesia. Dalam mewujudkan misi NPAP, biaya yang diperlukan adalah sekitar \$1,8-2,2 miliar per tahun. Oleh karena itu, satgas keuangan akan bekerja sama untuk memberikan rekomendasi, mendukung inisiatif yang ada, menciptakan peluang pendanaan baru, dan mengatasi hambatan kebijakan.

Pengelolaan program sekolah ekologis dan *youthtopia* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Tujuan dari kedua program tersebut tentunya sama, yaitu untuk mengedukasi pelajar mengenai bahaya dari permasalahan sampah plastik dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi plastik. Secara pengelolaan tentunya terdapat perbedaan. Program sekolah ekologis dikelola oleh PPLH Bali dengan berkolaborasi dengan anggota NPAP lainnya yaitu Kemendikbud, AZWI dan DKLH Bali. Pengelolaan utama program sekolah ekologis dilakukan oleh PPLH Bali sedangkan AZWI merupakan aliansi yang diikuti oleh PPLH Bali. DKLH Bali menjadi *data provider* atau *stakeholder* yang memberikan rekomendasi mengenai sekolah-sekolah di Bali yang bisa mengikuti program sekolah ekologis. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi sekolah diluar rekomendasi untuk bergabung dengan program ini. Rekomendasi sekolah dari PPLH merupakan sekolah yang sudah pernah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata ataupun sekolah penggerak. Program sekolah ekologis juga mendukung program Pemerintah Indonesia dibawah Kementerian Lingkungan Hidup yaitu sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang menerapkan gerakan peduli lingkungan di sekolahnya. Sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan gerakan peduli lingkungan akan diberikan penghargaan dan diberikan insentif. Menurut penulis, pemberian insentif tersebut tentunya menjadi bantuan pemerintah secara tidak langsung kepada program sekolah ekologis. Dengan adanya penghargaan sekolah adiwiyata, para pelajar dan civitas sekolah menjadi semangat untuk mengikuti program sekolah ekologis. Hal tersebut sesuai dengan salah satu upaya NPAP untuk merubah perilaku masyarakat menjadi peduli akan sampahnya yaitu dengan pemberian insentif.

PPLH Bali melalui sekolah ekologis membantu sekolah-sekolah untuk bisa membuat program-program yang menunjukkan kepedulian sekolah akan lingkungan. PPLH Bali memberikan sosialisasi, membantu membentuk program di sekolah-sekolah, serta memantau keberlanjutan dari program tersebut. Sesuai dengan pihak sekolah akan menunjuk duta *Ban the Big 5*, yang akan mengikuti sosialisasi oleh PPLH Bali. Duta tersebut akan mensosialisasikan kepada teman-teman lainnya mengenai pengurangan sampah plastik 5 jenis. Pembentukan duta tersebut tentunya membawa dampak positif pada lingkungan sekolah karena proses edukasi akan menjadi berlanjut saat para pelajar akan saling mengingatkan untuk tidak menggunakan plastik. Seringkali, pelajar akan mengingatkan para gurunya yang terkadang lupa untuk tidak menggunakan plastik. Menurut penulis, hal tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku pada pelajar yang menunjukkan kepeduliannya akan plastik beserta bahayanya dan menumbuhkan rasa tanggungjawab. Pada webinar, duta dan perwakilan sekolah akan berbagi cerita. Pada webinar tersebut, Kemendikbud membantu program sekolah ekologis dengan memberikan pandangan, saran dan kritik mengenai program yang sudah dijalankan sekolah. Kemendikbud juga dan mendorong sekolah-sekolah untuk berinovasi dan terus berkomitmen dalam program sekolah ekologis.

Youthtopia merupakan proyek yang dikelola oleh BBPB. Youthtopia mendukung upaya GPAP untuk menangani polusi sampah plastik secara global dan mendukung NPAP untuk mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia sebanyak 70%. Youthtopia mempunyai platform edukasi secara online yang bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Platform edukasi tersebut didukung secara langsung oleh WEF yang merupakan organisasi yang membentuk GPAP. Menurut Wijzen (2024), GPAP dan NPAP mendukung pembuatan masterclass di webstie youthtopia. Isi dari *masterclass* tersebut terdapat 10 topik yang membahas mengenai permasalahan plastik, jenis-jenis plastik, substitusi dari penggunaan plastik, ekonomi sirkular, dan materi lainnya. Secara pendanaan, WEF secara langsung memberikan dukungan finansial untuk berjalannya program-program di youthtopia. Selain memiliki platform online, youthtopia juga melakukan workshop ke berbagai kota dan negara salah satunya adalah Bali.

Bali merupakan titik awal dari upaya BBPB untuk mengurangi sampah plastik. BBPB dibentuk dan berawal dari Bali sehingga dampak yang diberikan BBPB kepada Bali sangatlah signifikan. Melalui youthtopia, BBPB sudah mengedukasi 700 sekolah di Bali dan memberikan buklet secara gratis. BBPB melakukan edukasi dengan berkunjung ke sekolah-sekolah atau berkunjung ke headquarter BBPB di Jalan Pantai Seseh, Bali. Beberapa sekolah di Bali yang sudah dikunjungi dan diberikan edukasi adalah The anak atelier, SD Jendela Dunia, Montessori school, SDN 4 Sibangede, SDN 4 Melinggi Kelod, SMAN 3 Denpasar, SMAN 7 Mengwi, SDN 3 Kerobokan, Sekolah Budaya Patumuantalino, dan Sekolah Adat Arus Kualan. Beberapa pemberian edukasi ke sekolah di desa seperti SMAN 7 Mengwi, melibatkan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya. Kegiatan edukasi mengenai pengurangan sampah plastik juga dibarengi dengan aktivitas yang membangun kreativitas seperti menggambar dan mewarnai. Beberapa sekolah yang telah diberikan edukasi juga ikut dalam aksi nyata untuk membersihkan pantai-pantai yang ada di Bali. Dengan adanya kegiatan bersih-bersih tersebut, pelajar jadi mengetahui kondisi sesungguhnya yang ada Bali, meningkatkan rasa tanggung jawab atas sampahnya, mendorong kerja sama tim, dan tentunya terlibat untuk mengurangi sampah plastik di perairan Bali secara langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dukungan yang di dapatkan sekolah ekologis dan youthtopia sebagai anggota dari NPAP terdapat perbedaan. Sekolah ekologis tidak diberikan pendanaan secara langsung. Pemerintah sebagai satgas NPAP mendukung dengan pemberian insentif pada penghargaan sekolah adiwiyata sehingga sekolah yang mengikuti program sekolah ekologis termotivasi untuk menerapkan program yang peduli lingkungan seperti pengurangan sampah plastik. Kemendikbud sebagai anggota satgas perubahan perilaku juga mendukung program ini dengan mendorong para pelajar beserta civitas sekolah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Di sisi lain, youthtopia

diberikan dukungan secara finansial oleh WEF dan bekerja sama untuk mengkreasikan masterclass dengan GPAP dan NPAP. Menurut penulis, hal tersebut dapat terjadi karena founder BBPB yaitu Melati Wijsen berperan sebagai plastic action champions dalam GPAP dan menjadi co-chair di NPAP Indonesia. Secara target sekolah di Bali, program youthtopia mengedukasi sekolah-sekolah dari berbagai jenis seperti sekolah negeri, internasional, sekolah budaya, dan sekolah adat. Di sisi lain, sekolah ekologis baru mencakup sekolah-sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta di Bali. Youthtopia sudah mengedukasi di 700 sekolah di Bali, sedangkan sekolah ekologis sudah mencapai 23 sekolah di Bali. Namun, sekolah ekologis dan youthtopia sama-sama mengedukasi pelajar di Bali mengenai permasalahan sampah plastik di Bali, Indonesia dan dampaknya secara global, bahaya yang dapat ditimbulkan dari sampah plastik, dan upaya yang bisa dilakukan pelajar untuk mengatasinya. Perbedaan edukasi yang terlihat dari kedua program ini adalah bahwa youthtopia juga mengajak pelajar untuk terjun langsung dalam pembersihan sampah plastik di perairan Bali, sedangkan sekolah ekologis tidak. Kedua program ini tentunya telah merubah perilaku pelajar menjadi tidak abai dan peduli terhadap lingkungannya, mengurangi penggunaan plastik, bertanggung jawab, dan tentunya berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah plastik di perairan Bali.

Reviewing and Revising

Pada tahap ketiga atau tahap kedua dalam implementasi yang dilakukan adalah *reviewing* dan *revising* atau pemantauan dan peninjauan. Tujuan utama pemantauan dan peninjauan adalah dapat mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan progress yang telah dilakukan. Dengan begitu, *stakeholder* dan pengambil keputusan dapat menentukan hal-hal yang perlu diadaptasi kembali, diperbaiki, diubah, atau keputusan lainnya. Tahap ini dilakukan secara bergantian dengan tahap sebelumnya yaitu *managing and maintaining*. Hal tersebut dimaksudkan bahwa program atau kerja sama yang berjalan akan terus dilaksanakan dan ditinjau secara bergantian dan terus menerus.

Tahapan pemantauan dan peninjauan dalam NPAP, dibantu oleh satgas metriks. Satgas metriks bertugas untuk menetapkan desain untuk pemantauan dan evaluasi program *stakeholder* di berbagai area. Tahapan yang direncanakan oleh satgas metriks untuk menetapkan desain tersebut terdiri dari 7 tahapan. Jika anggota NPAP ingin memulai program baru, anggota NPAP tersebut perlu memberi tahu sekretariat NPAP Indonesia mengenai rincian dan kebutuhan program tersebut. Kemudian, sekretariat akan memperbarui databasenya, berbagi peluang dengan satgas metriks, dan menghubungi anggota satgas metriks melalui WhatsApp dan email. Lalu, anggota NPAP tersebut mempresentasikan program pada pertemuan satgas metriks. Setelah itu, anggota NPAP tersebut diminta untuk merancang dan merencanakan pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi. Terakhir, program tersebut dimulai dan data yang dimiliki akan membantu pelaporan mengenai dampak NPAP (Indonesia National Plastic Action Partnership, 2021).

Namun, menurut Yanti (2024) perwakilan dari PPLH Bali, mereka tidak pernah berhubungan dengan WRI Indonesia sebagai sekretariat NPAP Indonesia secara langsung. Hubungan yang dijalin antara PPLH Bali dan WRI Indonesia tidak berkaitan dengan NPAP dan berkepentingan diluar NPAP. PPLH Bali juga tidak pernah menyerahkan pelaporan atau *reports* yang diserahkan kepada NPAP ataupun sekretariatnya secara langsung. Selama berjalannya program, PPLH Bali hanya berkoordinasi dengan AZWI dan melakukan pertemuan bulanan. Koordinasi dengan NPAP pernah dilakukan di tahun 2023 berupa meeting besar yang dihadiri anggota NPAP lainnya. Pada pertemuan tersebut, stakeholder-stakeholder melakukan presentasi mengenai program yang sudah dilakukan beserta hasil perkembangannya. Menurut Yanti (2024), pertemuan tersebut juga membuka sesi diskusi sehingga memungkinkan bagi para NGO untuk berinteraksi dengan perusahaan produsen plastik. Dengan adanya pertemuan tersebut, NGO dapat saling bertukar pikiran, NGO dapat memberikan saran kepada produsen plastik, sampai dengan terjalinnya kerja sama baru antar anggota.

Pada program sekolah ekologis, PPLH Bali menyelenggarakan webinar dan sidak untuk tahapan pemantauan dan peninjauan. Kegiatan webinar akan diisi oleh pemaparan dari sekolah-sekolah yang menjelaskan mengenai kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengurangi penggunaan plastik, tantangan dan hambatan yang dialami, program yang sudah dijalani, dan rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Selain webinar, kegiatan sidak oleh PPLH Bali. Dengan adanya sidak secara mendadak ini, sekolah akan tidak menyambut secara formal dan seremonial sehingga PPLH Bali dapat melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Pada *youthtopia*, pemantauan dilakukan dengan pembentukan *impact reports*. Laporan yang dibentuk berisikan mengenai ringkasan dampak dari program, aktivitas yang telah dijalankan, hasil kolaborasi, jumlah pengguna platform, keuangan, serta rencana untuk tahun selanjutnya.

Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan dapat ditemui dalam kerja sama multistakeholder NPAP di Indonesia ini. Menurut Yanti (2024), kerja sama *multistakeholder* ini seharusnya dapat mempertemukan berbagai *stakeholder* untuk bisa berdiskusi dan berinovasi bersama untuk mengurangi sampah plastik di perairan sebanyak 70%. Kerja sama *multistakeholder* ini juga berpotensi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan membawa perubahan yang lebih besar. Namun, sangat disayangkan bahwa pertemuan yang diselenggarakan oleh NPAP ini baru dilaksanakan sekali di tahun 2023. Pertemuan tersebut akan mengumpulkan berbagai *stakeholder* dan memungkinkan bagi para *stakeholder* untuk saling berdiskusi. NGO dapat memberikan saran kepada produsen plastik untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka timbulkan. NGO-NGO juga dapat saling terinspirasi mengenai program yang masing-masing dijalankan. Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali bahwa pertemuan ini jarang sekali dilakukan dan tidak terjadwalkan.

Selain itu, kekurangan dari kerja sama ini bahwa tidak adanya transparansi mengenai progress dari target NPAP Indonesia yaitu untuk mengurangi sampah plastik di perairan sebanyak 70%. Sesuai dengan tugas satgas metriks, seharusnya anggota satgas dapat menghitung keberhasilan dari upaya satgas-satgas NPAP. Menurut Yanti (2024), PPLH Bali sebagai NGO yang berusaha mencapai target yang diberikan NPAP merasa perlu mengetahui progress dari usahanya tersebut. Walaupun begitu, hal tersebut tidak membuat PPLH Bali lengah untuk menjalani programnya.

KESIMPULAN

NPAP adalah platform *multistakeholder* yang mencerminkan gerakan environmentalisme melalui keterlibatan dari aktivis, akademisi, relawan, profesional serta pemerintah untuk berupaya melindungi kekayaan alam dan ekosistem. Kerja sama *multistakeholder* dapat dianalisis melalui tiga tahap yaitu *scoping and building*, *managing and maintaining*, dan *reviewing and revising*. Pada tahap *scoping and building*, NPAP melakukan pemetaan terhadap satgas perilaku yang memberikan edukasi kepada pelajar di Bali. *Bye Bye Plastic Bags* atau BBPB dan PPLH Bali merupakan NGO yang berjuang dalam area tersebut dan mempercayai bahwa pengurangan sampah plastik bisa dilakukan dengan kerja sama *multistakeholder*. PPLH Bali memiliki peran sebagai *knowledge/data provider* dan *amplifier*, sedangkan BBPB berperan sebagai *amplifier* dan *influencer*. Pada tahap *managing and maintaining*, program sekolah ekologis dan *youthtopia* dikelola bersama-sama dengan anggota NPAP lainnya dengan memberikan edukasi mengenai permasalahan sampah plastik di perairan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Secara pendanaan, program tersebut ada yang didukung melalui pemberian insentif dan di danai secara langsung. Kedua program tersebut merubah perilaku pelajar menjadi lebih peduli terhadap sampah plastiknya. Pada tahap *reviewing and revising*, NPAP mengadakan pertemuan untuk berkoordinasi dengan anggota-anggota satgas. Pada program sekolah ekologis, dilakukan kegiatan webinar dan sidak untuk memantau kegiatan-kegiatan yang ada di

sekolah sedangkan youthtopia melalui pembentukan *impact reports*. Implikasi yang ditemukan adalah terciptanya efektivitas kolaborasi dan spesialisasi peran karena NPAP mendorong setiap satgas untuk berfokus pada peran dan tanggung jawab spesifik yang sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka. Dengan dukungan yang diberikan NPAP, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan menciptakan dampak yang lebih meluas. Kemudian, pemetaan yang secara spesifik telah dilakukan akhirnya membentuk sinergitas jaringan multistakeholder dan menciptakan ekosistem yang kolaboratif untuk memaksimalkan perubahan. Bertemunya berbagai stakeholder dapat memperluas jangkauan dampak positif dan mempunyai kesempatan untuk saling berkolaborasi dalam jangka panjang. Namun, hambatan dan tantangan juga ditemukan saat berjalannya kerja sama ini yaitu, bertemunya anggota-anggota NPAP yang masih jarang dilaksanakan. Oleh karena itu, pertemuan secara rutin perlu terjadwalkan sehingga anggota NPAP dapat berinteraksi dan mengetahui progres dari target NPAP.

Penulis memberikan beberapa saran praktis kepada NPAP Indonesia. Pertama adalah mengenai kurangnya pertemuan yang bisa mempertemukan anggota-anggota dari setiap satgas. Sejak berlangsungnya NPAP, pertemuan baru dilakukan sekali yaitu pada tahun 2023. Hal tersebut sangat disayangkan sekali karena pertemuan tersebut berpotensi untuk menciptakan inovasi baru, adanya diskusi antar stakeholder, saling terinspirasi, dan menciptakan solusi-solusi baru. Kemudian, saran yang penulis berikan adalah mengenai transparansi mengenai target NPAP. Transparansi tersebut dapat dilakukan dengan optimalisasi dari kinerja satgas metriks yang bertugas untuk mengukur keberhasilan NPAP. Selain NPAP Indonesia, penulis juga memberikan saran kepada PPLH Bali dan BBPB sebagai stakeholder yang menjalankan program edukasi kepada pelajar di Bali. Saran yang dapat diberikan adalah untuk mengimbangi edukasi di ruangan belajar dengan aktivitas pengurangan sampah plastik di lapangan seperti di pantai ataupun laut. Dengan begitu, pelajar dapat mengetahui kondisi lingkungannya secara langsung dan menciptakan kebiasaan yang baik untuk selalu bertanggung jawab atas sampahnya.

Kajian mengenai kerja sama multistakeholder pada NPAP masih jarang sekali ditemukan. NPAP melibatkan banyak sekali stakeholder sehingga berpotensi untuk memunculkan berbagai penelitian mengenai NPAP. Selain itu, penelitian mengenai kerja sama multistakeholder NPAP mengenai edukasi pada pelajar sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ke berbagai provinsi di Indonesia mengenai hal tersebut masih sangat diperlukan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan berbagai stakeholder untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di perairan. Terakhir, kerja sama ini masih berlangsung sehingga berpotensi besar untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sampai dengan tahap keberlanjutan kerja sama atau tahap *moving on renegotiation sustaining*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2017). Perubahan Perkembangan Perilaku Manusia Karena Belajar. *Sabilarrayad*.
- Arifin, M. Z. (2017). DAMPAK SAMPAH PLASTIK BAGI EKOSISTEM LAUT. *POJOK ILMIAH*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Bali Jadi Provinsi dengan Objek Wisata Favorit Wisatawan Asing*. Retrived from <https://data.goodstats.id/statistic/bali-jadi-provinsi-dengan-objek-wisata-favorit-wisatawan-asing-2DUme>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari). *10 Provinsi Ini Jadi Tujuan Berlibur Wisatawan Domestik Terbanyak*. Retrived from <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-ini-jadi-tujuan-berlibur-wisatawan-domestik-terbanyak-J4Qzx>
- Databoks. (2023). *Komposisi Timbulan Sampah Nasional Berdasarkan Sumbernya*. Retrived from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>
- Global Plastic Action Partnership. (n.d.). *Indonesia*. Retrieved from <https://www.globalplasticaction.org/indonesia>
- Gunawan, H. (2021). Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.

- Harlyandra, Y., & Kafa, A. K. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 54-68.
- Indonesia National Plastic Action Partnership. (2021). *NPAP Indonesia Behaviour Change Roadmap to Radically Reduce Plastic Pollution in Indonesia*. NPAP Indonesia.
- Indonesia National Plastic Action Partnership. (2021). *NPAP Indonesia : Metrics Roadmap*.
- Indonesia, N. (2020). *Financing System Change to Radically Reduce Plastic Pollution in Indonesia: A Financing Roadmap Developed by the Indonesia National Plastic Action Partnership*.
- Maisarah. (2021). TANTANGAN KOLABORASI NATIONAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP (NPAP)-GLOBAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP (GPAP) DALAM PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DI PERAIRAN INDONESIA (2019-2025): PERSPEKTIF ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL. *International Society*, 1-24.
- Marinda, L. (2020). TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN PROBLEMATIKANYA PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR . *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*.
- Mutia, A. (2022, November 12). *10 Negara Teratas yang Melepaskan Plastik Terbanyak ke Laut (2021)*. Retrieved from databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/12/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut-ri-peringkat-berapa>
<https://wri-indonesia.org/id/inisiatif/indonesia-national-plastic-action-partnership-npap>
- NPAP. (2022). *NPAP Indonesia: Policy Roadmap to Radically Reduce Plastic*.
- Nel, D. (2017). Multi-sector Stakeholder Partnerships as a Mechanism for Creating Public Value. *University of Johannesburg*, 63-76.
- Notoadmojo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PPLH Bali. (2023). *PUSAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BALI*. Retrived from <https://pplhbali.org/>
- Rini, D. S. (2008). Pengertian Pelajar Menurut para Ahli.
- Stibbe, D., & Prescott, D. (2016). *An introduction to multi-stakeholder partnerships*. Retrieved from <https://thepartneringinitiative.org/publications> research-papers/an-introduction-to-multi-stakeholder-partnerships/
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sungai Watch. (2021). *Sungai Watch Impact Report October 2020-December 2021*
- United Nations. (2020). *THE SDG PARTNERSHIP GUIDEBOOK*.
- Utami, S. N. (2022, Juli 5). Mengapa Plastik Sulit terurai? Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Plastik Sulit terurai?", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/05/120000469/mengapa-plastik-sulit-terurai->
Kompascom+ baca berita tanpa ik. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/05/120000469/mengapa-plastik-sulit-terurai->
- Wijisen, M. (2024). Bye Bye Plastic Bags. (Z. I. Pratama, Interviewer)
- WRI Indonesia. (n.d.). *Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP)*. Retrieved from
- Youthtopia. (2021). *Youthtopia Impact Report 2021*. Bali: Youthtopia.
- Yanti, D. (2024). PPLH Bali. (Z. I. Pratama, Interviewer)

BIOGRAFI

Zenith Irba Setya Pratama. Penulis lahir di Jakarta tanggal 4 November tahun 2002. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDIT Fajar Hidayah, SMP Labschool Cibubur, melanjutkan ke SMA Negeri 91 Jakarta, hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selama masa perkuliahan, penulis mempunyai ketertarikan pada isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional salah satunya dalah lingkungan.

Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, S.IP., M.Si. penulis menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, dan melanjutkan pendidikan magister di jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kepakaran yang sedang dibangun meliputi Tata Kelola Global, Ekonomi Politik Global,

dan Diplomasi. Saat ini merupakan dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.